



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 049/IMS-SK/V/2018

Tentang

Keputusan Hasil Penilikan PHPL IUPHHK-HT PT SILVA RIMBA LESTARI

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL IUPHHK-HT PT SILVA RIMBA LESTARI dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor : 165/Menhut-II/2011, tanggal 4 April 2011 yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas ± 88.000 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 20 – 27 April 2018.
 3. Data pendukung penilikan kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) IUPHHK-HT PT SILVA RIMBA LESTARI.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 16 Mei 2018.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilikan kinerja PHPL Tim Auditor terhadap IUPHHK-HT PT SILVA RIMBA LESTARI dengan predikat kinerja **BAIK**
 2. Menerbitkan Sertifikat PHPL kepada **PT SILVA RIMBA LESTARI**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.
 5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system manajemen pemegang sertifikat.
 6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
 7. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
 8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
 9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia

dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.

10. Sertifikat dapat dicabut apabila:

- a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
- b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
- c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.

11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 16 Mei 2018
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT PHPL

NOMOR : IMS-SPHPL-019



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

PT SILVA RIMBA LESTARI

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT)
SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 165/Menhut-II/2011, TANGGAL 4 APRIL 2011
LUAS AREAL : ± 88.000Ha
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

Dengan Predikat Kinerja PHPL : BAIK

Ir. Dwi Harsono
DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 16 Mei 2018
Masa Berlaku : 16 Mei 2018 s.d 27 Mei 2020



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUPHHK-HT SILVA RIMBA

1. Identitas LP PHPL

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN, Tanggal 2 September 2010
c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934
intimultimasertifikasi@gmail.com
ims@intimultimasertifikasi.com
e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
f. Tim Auditor :
- Lead Auditor/ Auditor Produksi : Dasep Gunawan, S.Hut
- Auditor Kriteria Prasyarat : Setiaji Heri Saputro, S Hut
- Auditor Ekologi : Indra Sofian, S Hut
- Auditor Kriteria Sosial : Ir. Suryamada Bakti
- Auditor VLK : Erwin Iskandar, S Hut
g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : **PT SILVA RIMBA LESTARI**
b. Pendirian Perusahaan :
- Akta Pendirian : Akta Notaris Eliwaty Tjitra, SH., No. 233 tanggal 22 Agustus 2008
- Akta Perubahan Terakhir : Akta Notaris Fellisia, S.H., M.Kn., No. 8 tanggal 21 Desember 2017
c. SK Izin Usaha : Keputusan Menteri Kehutanan No. 165/Menhut-II/2011 tanggal 4 April 2011, tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT Silva Rimba Lestari Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 88.000 Ha di Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvInsi Kalimantan Timur
d. Kantor : Jl. Aipda KS. Tubun Raya No. 66C, RT 001, RW 001, Kel. Slipi, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11410. Tlp. (021) 53672792 / (021) 53672895
Jl. Marsma R. Iswahyudi, Sepinggan Raya, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115

3. TAHAPAN PENILAIAN

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|--------------------------------------|--------------------------|--|
| Koordinasi dengan Instansi Kehutanan | Samarinda, 20 April 2018 | <ul style="list-style-type: none">▪ Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur▪ Koordinasi dengan BPHP Wilayah XI Samarinda |



| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|--------------------------|---|
| Pertemuan Pembukaan | Base Camp, 21 April 2018 | Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susun tim auditor. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 21-26 April 2018 | a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisa menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.2 dan 2.1 PERDIRJEN PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). |
| Pertemuan Penutupan | 26 april 2018 | a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu penentuan LKS c. Membuat dan menandatangani BA Pertemuan Penutupan. |
| Koordinasi dengan Instansi Kehutanan | 27 April 2018 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ▪ Koordinasi dengan BPHP Wilayah XI Samarinda |
| Pengambilan Keputusan | 16 Mei 2018 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ PT SILVA RIMBA LESTARI dinyatakan LULUS sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hutan Tanaman dengan Predikat "BAIK" dan VLK Hutan MEMENUHI. |

4. HASIL PENILAIAN

A. Kriteria Prasyarat

| Indikator | Verifier | Auditor | |
|-----------------------|----------|-------------|--|
| | | Nilai | Argumen |
| 1.1. SEDANG (2) | 1.1.1 | Baik (3) | Dokumen legal perusahaan PT SRL tersedia lengkap dibuktikan dengan adanya dokumen Akta pendirian perusahaan Akta Notaris Nomor 233 tanggal 22 Agustus 2008 oleh Notaris EliwatyTjitra, SH., dan Akta perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT SRL No. 21 Desember 2017, Notaris Fellisia, S.H., M.Kn. serta tersedianya Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.165/Menhut-II/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT SRL atas Areal Hutan Produksi seluas ± 88.000 Ha di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. |



| Indikator | Verifier | Auditor | |
|---------------------|----------|---------------|--|
| | | Nilai | Argumen |
| | | | Dokumen administrasi tata batas juga tersedia lengkap dengan adanya Laporan TBT No. Lp.70/BPKH IV-2/PKH/PLA.0.4/9/2017 Tahun 2017, Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) PT Silva Rimba Lestari, Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HTI PT Sendawar Adhi Karya, IUPHHK-HTI PT Acacia Andalan Utama, IUPHHK-HTI PT Hutan Kusuma, IUPHHK-HA PT Jaya Timber Trading dan IUPHHK-HA PT Belayan River Timber sepanjang 238.076,98 meter di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, September 2017 (dilengkapi peta dan Berita Acara Tata Batas) |
| | 1.1.2 | Sedang (2) | Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) PT Silva Rimba Lestari, Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HTI PT Sendawar Adhi Karya, IUPHHK-HTI PT Acacia Andalan Utama, IUPHHK-HTI PT Hutan Kusuma, IUPHHK-HA PT Jaya Timber Trading dan IUPHHK-HA PT Belayan River Timber sepanjang 238.076,98 meter di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur telah selesai dilaksanakan berdasarkan Pedoman Tat Batas / Pernyataan Nomor 09/PB/IUPHHK-HTI/2013 tanggal 18 Januari 2013 dan Instruksi Kerja Tata Batas Nomor 106/ITK/BPKH IV-12/2013 tanggal 26 Juli 2013. Untuk legitimasinya, Penataan Batas areal kerja PT SRL masih kurang, yaitu berupa BATB untuk Trayek 7'-O'-P'-1'-2'-3'-4'-5'-Q yang diserahkan kepada Panitia Tata Batas di daerah. Untuk proses Penetapan Areal Kerja, PT SRL agar menindaklanjuti proses Panitia Tata Batas di daerah. |
| | 1.1.3 | Baik (3) | Terdapat konflik berupa klaim lahan oleh perseorangan. PT SRL berupaya melakukan monitoring terhadap potensi-potensi dan konflik lahan yang akan terjadi baik dalam periode 15 harian, bulanan maupun tahunan. PT SRL telah membuat rencana penyelesaian kasus per kasus konflik yang muncul setiap waktu dan terdokumentasi dengan baik. Upaya penyelesaian Klaim Lahan tersebut dituangkan dalam dokumen Rekapitulasi Penyelesaian Klaim Lahan PT SRL periode bulanan. Selama 1 tahun, progress penyelesaian konflik lahan dilaporkan dalam dokumen Monitoring Penyelesaian Konflik Lahan PT SRL Periode 1 Tahun. |
| | 1.1.4 | Sedang (2) | No.79/Menhut-II/2001, Peta SK No.554/Menhut-II/2013, dan Peta SK.No.718/Menhut-II/2014 menunjukkan adanya perubahan fungsi kawasan dengan luasan yang signifikan pada fungsi HP dan HPT, maupun HPK dan APL. Dengan demikian diperlukan revisi RKU dengan Peta SK 718/Menhut-II/2013 tanggal 29 Agustus 2014 sebagai acuan untuk revisi RKU Tahun 2011sd 2020. Saat ini PT SRL sedang melakukan persiapan untuk melakukan perubahan/revisi RKU tahun 2011 sd 2020 |
| | 1.1.5 | Sedang (2) | PT SRL belum melakukan pelaporan kepada instansi yang berwenang. Pendataan yang dilakukan oleh PT SRL berupa pengumpulan berkas-berkas IPPKH pada tahun 2017. |
| 1.2. BAIK (3) | 1.2.1 | Baik (3) | Visi perusahaan group dari PT SRL mencerminkan ingin memiliki daya saing dengan perusahaan yang lain tetapi tetap menerapkan prinsip kelestarian. Misi perusahaan mencerminkan keinginan PT SRL yang senantiasa berorientasi pada pasar dan kualitas. Visi dan misi ini telah diterjemahkan oleh perusahaan menjadi kebijakan-kebijakan |
| | 1.2.2 | Baik (3) | PT SRL telah melakukan sosialisasi visi misi kepada seluruh karyawan di Distrik Kembang Janggut tanggal 28 Agustus 2017. Telah dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi RKT 2018 PT SRL pada tanggal 22 Maret 2018 bertempat di Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Kembang Janggut yang dalam kegiatan ini dilakukan sosialisasi visi misi PT SRL. Kegiatan ini bertujuan memberi informasi kepada <i>stakeholder</i> khususnya masyarakat desa binaan PT SRL agar memahami tentang arah/gambaran umum PT SRL kedepannya |
| | 1.2.3 | Sedang (2) | Implementasi visi dan misi oleh PT SRL di lapangan dalam aspek produksi, ekologi dan sosial sebagian besar sudah sesuai dengan PHL. |
| 1.3 BAIK | 1.3.1 | Baik (3) | Pemenuhan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.16/PHPL-IPHH/201 tentang jumlah GANIS PHPL yang dimiliki dan/atau |



| Indikator | Verifier | Auditor | |
|---------------------|----------|---------------|--|
| | | Nilai | Argumen |
| (3) | | | dipekerjakan pada PT SRL sudah memenuhi semua bidang dan jumlahnya sudah mencukupi |
| | 1.3.2 | Sedang (2) | Database Training 2017 PT SRL, menunjukkan adanya Rencana sejumlah 32 Subyek Training dan Realisasi sejumlah 19 Subyek Training. Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT SRL periode tahun 2017 tercapai $19/32 \times 100\% = 59,4\%$ |
| | 1.3.3 | Baik (3) | Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di PT SRL sudah memenuhi ke-6 kategori, yaitu Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan dengan Karyawannya, Dokumen Standar Operasional Presedure, Dokumen Serikat Pekerja, Dokumen Keselamatan Kerja. Dokumen Jaminan Kesehatan, dan Laporan Ketenagakerjaan kepada instansi terkait, sehingga ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di PT SRL termasuk lengkap. |
| 1.4. BAIK (3) | 1.4.1 | Baik (3) | PT SRL memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang telah ditandatangani Direktur, dalam 12 (dua belas) bulan terakhir hanya terdapat pergantian pejabat Distrik Manager. Unit kerja dalam struktur organisasi terdapat bagian khusus yang menangani kelola PHPL dan <i>job description</i> bagian yang menangani tata usaha kayu dan perencanaan telah disesuaikan Sistem Integrasi-PHPL mengacu PermenLHK. No: P.45/Menlhk-Setjen/2015 dan Perdirjen. PHPL Nomor: P.10/PHPL/UHP/ PHPL.1/3/2016 |
| | 1.4.2 | Baik (3) | Perangkat Software SIM yang diterapkan secara internal PT SRL adalah SAP, Portal ABI, ABIS, Arc GIS, SPARK, dan ZIMBRA. Seluruh aplikasi tersebut terdefiniskan usernya, sehingga seluruh perangkat SIM tersebut terkendali dengan baik. Perangkat-perangkat sistem informasi tersebut di atas merupakan perangkat dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan hutan tanaman PT SRL baik perencanaan, pelaksanaan penanaman, pemeliharaan, produksi dan sebagainya. Perangkat-perangkat tersebut juga merupakan perangkat pengambil kebijakan dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan |
| | 1.4.3 | Baik (3) | Organisasi SPI/Internal Auditor sudah ada serta melakukan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan pemeriksaan/audit/evaluasi terhadap pekerjaan-pekerjaan di lapangan. Dalam pemeriksaannya, SPI/Internal Auditor memeriksa seluruh tahapan dalam setiap aspek |
| | 1.4.4 | Baik (3) | Laporan audit Internal yang dilakukan di PT SRL sudah detail dan berorientasi pada perbaikan perusahaan. Terdapat paparan resiko yang akan timbul dari setiap temuan masalah/kasus. Untuk perbaikan, Internal Auditor memberikan rekomendasi yang bisa dilakukan untuk perbaikannya. Pihak yang terkait akan senantiasa dipantau untuk tindak lanjutnya. Bahkan pemantauan juga diarahkan pada PIC dan target waktunya. Laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan SPI menunjukkan adanya upaya tindakan pencegahan dan perbaikan oleh manajemen. Dalam laporan ini jelas disebutkan adanya permasalahan yang harus diselesaikan dan dicegah untuk tidak terjadi lagi dalam perusahaan. Dalam laporan ini dibuatkan rekomendasi dari SPI/Auditor Internal untuk ditanggapi dan dilaksanakan |
| 1.5. BAIK (3) | 1.5.1 | Baik (3) | RKT 2018 telah disosialisasikan kepada masyarakat yang terkena dampak (desa Pulau Pinang dan desa Long Beleh). Masyarakat menyatakan persetujuannya atas dasar informasi awal tersebut |
| | 1.5.2 | Sedang (2) | Pihak yang telah menandatangani persetujuan batas areal kerja PT SRL melalui Berita Acara Tata Batas PT SRL terdiri-dari Desa Buluq Sen, Desa Bengen, Desa Muara Ritan, Desa Pulau Pinang, Desa Lamin, Telihan, Desa Long Beleh, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kembang Janggut. Sedangkan yang tidak turut serta dalam penandatanganan dokumen tersebut diantaranya Desa Long Lalang, Desa Bukit Layang dan Desa Kembang Janggut. Sehingga pihak yang menandatangani persetujuan tata batas tercatat sebesar $72,72\% (8/11 \times 100\%)$ |
| | 1.5.3 | Baik (3) | Program CSR/Rencana Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat telah disusun, mencakup Pembinaan/Perbaikan infrastruktur, Peningkatan Sumber daya manusia (Penyuluhan, Pelatihan, Beasiswa, tenaga pendidik), Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Kerjasama dengan koperasi sekitar hutan, membangun kemitraan usaha tanaman kehidupan. Pelaksanaan PCI tahun 2017 sudah mencakup 3 desa. |



| Indikator | Verifier | Auditor | |
|-----------|----------|---------------|--|
| | | Nilai | Argumen |
| | 1.5.4 | Sedang (2) | Penetapan kawasan lindung PT SRL pada dokumen AMDAL telah disetujui oleh wakil masyarakat desa Long Beleh, Desa Kalaha dan Desa Long Lalang. Proses persetujuan dilakukan oleh PT SRL terus menerus hingga kegiatan perusahaan beroperasi, dan saat ini telah mendapatkan kesepakatan dari wakil masyarakat Desa: Long Beleh, Long Lalang, Pulau Pinang, Muara Ritan, Long Beleh Haloq dan Muara Ritan. Jadi pihak yang menyetujui dalam proses penetapan kawasan lindung adalah 6 dari 7 pihak = $6/7 \times 100\% = 85,71\%$ |

B. Kriteria Produksi

| Indikator | Verifier | Auditor | |
|---------------------|----------|----------------------|--|
| | | Nilai | Argumen |
| 2.1. BAIK (3) | 2.1.1 | Baik (3) | Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTII) A.n PT SRL untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2011 – 2020 beserta Lampiran Peta skala 1 : 100.000 yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 36/VI-BUHT/2014 tanggal 18 Juli 2014. Penyusunan dokumen tersebut telah mempertimbangan deliniasi mikro yang disusun tahun 2011, terutama dalam penetapan tata ruang areal kerja. Disamping itu, PT SRL tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU |
| | 2.1.2 | Sedang (2) | PT SRL telah melakukan penataan areal kerjanya dalam Blok dan Kompartemen/Petak tebangan dengan mengacu pada dokumen RKUPHHK-HTI yang telah disahkan. Luas realisasi PAK PT SRL tahun 2018 telah sesuai dengan rencana yang tercantum dalam dokumen RKUPHHK-HT (realisasi PAK tanaman Pokok sebesar 61,10%, PAK Kawasan Lindung/Buffer Zone/Sempadan Sungai terealisasi sebesar 21,25%. Lokasi realisasi PAK tahun 2017 dan 2018 menunjukkan hanya sebagian ($\geq 50\%$) areal sesuai dengan rencana PAK pada dokumen RKUPHHK-HT 10 (sepuluh) tahun periode 2011 - 2020 |
| | 2.1.3 | Baik (3) | Penandaan batas blok/kompartemen/petak kerja PT SRL menggunakan papan nama, pal batas (patok) blok/kompartemen/petak dan jaringan jalan (jalan Utama dan/atau jalan cabang). Tanda batas blok/kompartemen/petak kerja PT SRL dapat terlihat dengan jelas di lapangan |
| 2.2. BAIK (3) | 2.2.1 | Baik (3) | PT SRL telah memiliki data potensi tegakan untuk seluruh areal kerja berdasarkan hasil Hasil <i>Timber Cruising</i> (Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan) PT SRL tahun 2016, 2017 dan 2018 yang dilengkapi dengan peta pendukungnya (Peta Rencana Kerja dan Peta Realisasi Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) pada masing-masing periode serta lokasi kegiatan. Peta tersebut dibuat dalam skala 1 : 100.000) |
| | 2.2.2 | Baik (3) | PT SRL telah memiliki data riap tegakan berdasarkan hasil pengukuran pertumbuhan dan riap pada PSP di areal kerja untuk masing-masing <i>species</i> (<i>Acacia mangium</i> , <i>Eucalyptus pelita</i> , <i>Anthocephalus cadamba</i> dan <i>Paraserianthes falcataria</i>) dan masing-masing tahun tanam. Seluruh data hasil pengukuran tersebut telah di analisis. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan volume tanaman <i>Acacia mangium</i> (tahun tanam 2012-2015) berkisar antara 69,0 – 87,0 m ³ /ha, <i>Eucalyptus pelita</i> (tahun tanam 2016-2017) berkisar antara 7,8 – 9,9 m ³ /ha, <i>Anthocephalus cadamba</i> (tahun tanam 2016-2017) berkisar antara 1,9 – 3,8 m ³ /ha dan <i>Paraserianthes falcataria</i> (tahun tanam 2015-2017) berkisar antara 9,8 – 15,3 m ³ /ha |
| | 2.2.3 | Tidak Diterapkan/ NA | PT SRL belum menyusun perencanaan penebangan (Jatah Tebangan Tahunan/JTT) untuk kayu hutan tanaman, karena Penanaman tanaman pokok pertama dilakukan pada tahun 2012 (paling tua ditanam pada bulan Juni 2012) dengan jenis tanaman <i>Acacia mangium</i> , sehingga pada saat ini tanaman tersebut baru memasuki umur 6 tahun. Daur tanaman <i>Acacia mangium</i> ditetapkan dengan daur 8 (delapan) tahun tanpa penjarangan, sehingga |



| Indikator | Verifier | Auditor | |
|-----------------------|----------|-----------------------------|--|
| | | Nilai | Argumen |
| | | | terhadap tanaman tersebut pada saat ini (tahun 2018) belum dilakukan penebangan. Kegiatan penebangan yang dilakukan PT SRL selama ini adalah penebangan pada areal penyiapan lahan dengan tegakan berupa hutan alam. Atas dasar hal tersebut, verifier ini tidak diterapkan (<i>Not Aplicable</i>) |
| 2.3. BAIK (3) | 2.3.1 | Sedang (2) | PT SRL telah memiliki SOP tahapan sistem silvikultur THPB dengan lengkap tetapi hanya memiliki sebagian SOP tahapan sistem silvikultur TPTJ. Dokumen SOP yang tersedia sebagian besar telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yang berlaku, namun belum memisahkan antara SOP tahapan sistem silvikultur THPB dengan SOP tahapan sistem silvikultur TPTJ |
| | 2.3.2 | Baik (3) | PT SRL telah mengimplementasikan seluruh SOP tahapan sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, walaupun pada beberapa SOP tahapan sistem silvikultur belum diimplementasikan secara sempurna tetapi tidak mempengaruhi tahapan kegiatan yang ditetapkan |
| | 2.3.3 | Sedang (2) | Rata-rata potensi tegakan tanaman <i>Acacia mangium</i> sebelum masak tebang di areal PT SRL pada saat pengukuran (2017 dan 2018) dengan umur tanaman antara 4,8 – 5,3 tahun tercatat sebesar 89,32 m ³ /Ha. Potensi tegakan tersebut termasuk ke dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil |
| | 2.3.4 | Baik (3) | Prosentase hidup tanaman yang ditanam pada tahun 2018 dengan jenis tanaman <i>Acacia mangium</i> (Akasia mangium) tercapai sebesar 98,38%, <i>Paraserianthes falcataria</i> (Sengon) sebesar 98,57%, <i>Eucalyptus pellita</i> (Eucalyptus) sebesar 97,60%. Rata-rata persen tumbuh seluruh jenis tercapai sebesar 98,35% |
| 2.4. BAIK (3) | 2.4.1 | Sedang (2) | PT SRL telah memiliki dokumen prosedur terkait pemanfaatan/pengelolaan ramah lingkungan pada tahap perencanaan (SOP Penataan Areal Kerja (PAK), SOP Pemetaan GIS dan Pemeliharaan Database, SOP Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) – Hutan Alam, SOP <i>Pre Harvesting Inventory</i> , SOP Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), SOP Pembuatan Jalan dan Jembatan), tahap operasi pemanenan (SOP Pemanen Kayu Alam dan SOP Pemanenan Kayu Hutan Tanaman Industri) serta Pemeliharaan, Kesehatan Kamp dan Keselamatan Kerja (SOP Inspeksi Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Namun PT SRL belum memiliki SOP Kegiatan Pasca Pemanenan Kayu (Penutupan Jalan, Penutupan Jalan Sarad, Penutupan Penyeberangan Sementara, Penutupan Tpn). PT SRL belum memiliki dokumen prosedur terkait pemanfaatan/pengelolaan ramah lingkungan untuk pengelolaan hutan dengan sistem silvikultur TPTJ sesuai dengan rencana pengelolaan dalam RKUPHHK-HT periode tahun 2011 - 2021. |
| | 2.4.2 | Baik (3) | PT SRL telah mengimplementasikan SOP pemanfaatan/pengelolaan ramah lingkungan pada 3 (tiga) tahapan kegiatan, yaitu tahapan perencanaan pemanenan (PAK, Pembuatan peta rencana pemanenan, ITSP/PHI, PWH), tahapan operasi pemanenan (pemanenan hutan tanaman sesuai dengan teknik yang benar, pembuatan gawang, pembuatan terasering) dan tahapan Pemeliharaan, Kesehatan Camp dan Keselamatan Kerja (Inspeksi dan pemeliharaan harian terhadap bangunan Camp, baik kantor, mess karyawan dan bangunan lainnya, pemakaian APD, Penyediaan sarana dan prasarana K3 (APD) dan pengelolaan lingkungan). PT SRL belum menerapkan pemanfaatan/pengelolaan Pemanenan Ramah Lingkungan pada kegiatan Pasca Pemanenan Kayu (Penutupan Jalan, Penutupan Jalan Sarad, Penutupan Penyeberangan Sementara, Penutupan Tpn, Penutupan Kamp dan Bengkel serta Pemeliharaan Rutin) |
| | 2.4.3 | Tidak Diterapkan/ <i>NA</i> | PT SRL belum melakukan kegiatan penebangan hutan tanaman karena tanaman pokok yang ditanam oleh PT SRL pada saat ini belum memasuki umur masak tebang |
| 2.5. SEDANG (2) | 2.5.1 | Sedang (2) | Tersedia dokumen RKTUPHHK-HTII PT SRL periode tahun 2017 (Surat Keputusan Direktur Utama PT SRL No. SK.001/DIR/RKT-SRL/I/2017 tanggal 03 Januari 2017), Revisi RKTUPHHK-HTII PT SRL periode tahun 2017 (Surat Keputusan Direktur Utama PT SRL No. SK.002/DIR/RKT-SRL/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017) dan |



| Indikator | Verifier | Auditor | |
|-----------------------|----------|---------------|---|
| | | Nilai | Argumen |
| | | | RKTUPHHK-HTII PT SRL periode tahun 2018 (Surat Keputusan Direktur Utama PT SRL No. SK.001/DIR/RKT-SRL/I/2018 tanggal 1 Januari 2018). Dokumen RKTUPHHK-HT PT SRL periode tahun 2017 dan 2018 tersebut disusun berdasarkan RKUPHHK-HT PT SRL Periode Tahun 2011 – 2020. Namun pada masing-masing volume rencana kegiatan terdapat perbedaan antara keduanya, termasuk perbedaan sebagian realisasi lokasi blok RKTUPHHK-HT |
| | 2.5.2 | Sedang (2) | Tersedia Peta Operasional (Kerja) dan peta rencana kerja jangka panjang (Revisi RKUPHHK-HT Periode Tahun 2011-2020) dan jangka pendek (RKTUPHHK-HT tahun 2017 dan 2018). Seluruh peta kerja tersebut telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara dan areal yang termasuk ke dalam kawasan lindung (Sempadan sungai, KPPN, KPSL, Buffer Zone HL dan Areal Konservasi Rawa. Kesesuaian RKTUPHHK-HT 2017 dan 2018 dengan RKUPHHK-HT Periode Tahun 2011 – 2020 hanya sebagian. Demikian pula peta operasional (operasional, hanya sebagian yang sesuai dengan Peta RKUPHHK-HT Periode Tahun 2011 – 2020 |
| | 2.5.3 | Sedang (2) | PT SRL telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Penandaan batas pada tahun 2018 untuk blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara untuk areal yang diperuntukan sebagai areal tanaman pokok terealisasi sebesar 81%, areal tanaman kehidupan sebesar 100%. Sedangkan penandaan batas Kawasan Lindung berupa <i>Buffer Zone</i> HL, Sempadan Sungai, Kawasan Lindung Rawa, KPPN, KPSL sampai dengan tahun 2018 tercapai sebesar 82,57% dari total yang seharusnya. |
| | 2.5.4 | Baik (3) | Realisasi produksi PT SRL pada periode 2017 tercapai 85,97% dari total rencana pemanenan. Realisasi volume hasil penebangan tersebut terdiri dari kelompok jenis Meranti 80,28% , jenis Rimba Campuran sebesar 91,82% dan jenis Kayu Indah sebesar 9,50% dari rencana. Berdasarkan luas, realisasi produksi pada tahun 2017 tercapai 62,21%. Lokasi penebangan sesuai dengan RKT 2017 yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan |
| 2.6. SEDANG (2) | 2.6.1 | Buruk (1) | Kondisi kesehatan finansial PT SRL pada tahun 2016 terdiri-dari Likuiditas tercatat sebesar 204,40%, Solvabilitas sebesar 3,52% dan rentabilitas sebesar - 0,91% (negatif). Laporan Auditor Independen (Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard) No. 176/C/AR-17, tanggal 30 Mei 2017, menyatakan opini wajar dengan pengecualian mengenai perusahaan belum membukukan liabilitas imbalan kerja karyawan |
| | 2.6.2 | Sedang (2) | Rata-rata total realisasi alokasi dana PT SRL dalam rangka pengelolaan hutan alam pada periode tahun 2016 adalah sebesar 99,64% dari total alokasi dana yang direncanakan. Namun demikian, realisasi pendanaan tersebut hanya mencukupi untuk merealisasikan kebutuhan kelola hutan sebesar 64,47% dari yang seharusnya |
| | 2.6.3 | Baik (3) | Rata-rata realisasi alokasi dana pada tahun 2016 diberikan secara proporsional antar bidang kegiatan (realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan $\leq 20\%$), dimana realisasi alokasi dana terbesar terjadi pada kegiatan pendanaan untuk Kewajiban Kepada Lingkungan dan Sosial sebesar 99,89% dari total biaya yang direncanakan. Pencapaian terendah terjadi pada pendanaan bidang Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan Hutan sebesar 93,81% dari total biaya yang direncanakan sebesar . Sehingga terdapat perbedaan realisasi alokasi dana tercatat sebesar 6,08% |
| | 2.6.4 | Sedang (2) | Realisasi pendanaan untuk teknis kegiatan kelola hutan tanaman pada tahun 2016 tercapai 99,64%. Realisasi pendanaan tersebut hanya dapat merealisasikan kegiatan fisik yang masih bervariasi dan tidak mencapai target yang direncanakan yaitu antara 49,47% – 80,69% sesuai dengan tata waktu yang direncanakan dengan rata-rata sebesar 64,47%. |
| | 2.6.5 | Baik (3) | Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan PT SRL periode tahun 2016 yaitu tercapai sebesar 99,46% dari total biaya yang direncanakan. Realisasi |



| Indikator | Verifier | Auditor | |
|-----------|----------|------------|---|
| | | Nilai | Argumen |
| | | | tersebut, merupakan realisasi dana untuk kegiatan Pembibitan dan Penanaman (penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan) |
| | 2.6.6 | Sedang (2) | Realisasi kegiatan Penanaman (tanaman pokok, tanaman kehidupan) PT SRL untuk periode tahun 2017 tercapai 56,63% . Sedangkan untuk periode tahun 2018 (data sampai dengan bulan Maret 2018) tercapai 10,79%. |

C. Kriteria Ekologi

| Indikator | Verifier | Auditor | |
|-----------------------|----------|------------|---|
| | | Nilai | Argumen |
| 3.1. SEDANG (2) | 3.1.1. | Sedang (2) | Penetapan Kawasan Lindung PT SRL Tanggal 2 April 2018 yang ditandatangani oleh Ir. Budi Eko Utomo selaku Direktur perusahaan Surat Keputusan Nomor : 002/SRL-SK-ADM/IV/2018. Jenis dan luas kawasan lindung yang ditetapkan terdiri dari : buffer zone KL : 1.104 ha; kawasan lindung rawa : 1.253 ha; KPPN : 5.631 ha; KPSL : 2.355 ha dan sempadan sungai 1.310 ha. Jenis dan luas kawasan lindung sebagaimana ditetapkan tersebut sesuai dengan kawasan lindung yang dirinci pada dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT SRL Periode 2011 s/d 2020. Sebagian kondisi biofisik lindung sempadan sungai tidak sesuai. Hal ini disebabkan ada sebagian sungai yang sempadannya belum dialokasikan sebagai kawasan lindung. |
| | 3.1.2 | Sedang (2) | Penataan kawasan lindung selama periode April 2017 s/d Maret 2018 dilakukan di sempadan sungai dan kawasan lindung rawa dengan total panjang yang ditata batas mencapai 61.903 m. Seluruh hasil pelaksanaan penataan batas disampaikan pada dokumen berita acara. Prestasi penataan batas kawasan lindung PT SRL sampai dengan tahun 2018 mencapai 328.434 m atau setara dengan 82,67 % dari total panjang kawasan lindung. Tanda batas yang ditemukan berupa papan nama, pal batas dan tanda rintisan. |
| | 3.1.3 | Baik (3) | Sesuai hasil penampalan peta landsat yang tersedia yaitu Peta Citra Satelit Citra Landsat 8 OLI Band 654 Path/Row 117/60 liputan tanggal 28 April 2016 dengan peta lampiran dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT SRL Periode 2011 s/d 2020 diperoleh data audit tutupan kawasan lindung yang masih berhutan mencapai 10.382 ha atau setara dengan 89,09 % dari total luas kawasan lindung. Kawasan lindung yang mengalami kerusakan cukup parah adalah kawasan lindung rawa dengan areal yang terbuka mencapai 608 ha atau setara dengan 45,57 % dari total luas kawasan lindung tersebut. Tanda gangguan yang ditemukan berupa ditemukannya mesin penarik log disekitar kawasan lindung tersebut. |
| | 3.1.4 | Baik (3) | Para pihak telah mengakui kawasan lindung yang ditetapkan PT SRL disertai dengan bukti-bukti pengakuannya yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat. Bukti pengakuannya berupa dokumen Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.VI-BUHT/2014 Tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HT Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2011 – 2020 Atas Nama PT SRL di Provinsi Kalimantan Timur, dimana dokumen perencanaan perusahaan tersebut merinci kawasan lindung pemegang izin. 2. Manajemen PT SRL. Bukti pengakuannya berupa dokumen-dokumen kelola kawasan lindung seperti Berita Acara Penataan Batas, Laporan Kelola Kawasan Lindung termasuk Surat Keputusan Nomor : 002/SRL-SK-ADM/IV/2018 Perihal : Penetapan Kawasan Lindung PT Silva Rimba Lestari. 3. Masyarakat desa sekitar areal kerja terdiri dari 6(enam) desa. Adapun yang mengakui adalah desa: <ol style="list-style-type: none"> a. Masyarakat Desa Long Beleh Haloq 2011, b. Desa Pulau Pinang Kecamatan Kembang Janggut 2012, c. Masyarakat Desa Long Lalang tanggal 22 Juni 2013 Sedang desa lainnya yang sudah dilakukan sosialisasi Kawasan Lindung adalah desa: Desa Long Beleh Haloq dan Desa Pulau Pinang. Para pihak yang mengakui keberadaan kawasan lindung telah lebih dari 50%. |



| Indikator | Verifier | Auditor | |
|--------------------|----------|------------|--|
| | | Nilai | Argumen |
| | 3.1.5 | Sedang (2) | <p>Terdapat beberapa dokumen laporan hasil tindak kelola kawasan lindung yaitu : 1). Berita Acara Penetapan Kawasan Lindung Sempadan Sungai; 2). Berita Acara Penetapan KPPN; 3). Laporan Pemasangan <i>Signboard</i>; 4). Sosialisasi kawasan lindung; 5). Laporan kuartal Pengelolaan Kawasan Lindung. Laporan yang terbit selama periode 1 tahun terakhir terdiri dari : Laporan Kawasan Lindung PT Silva Rimba Lestari Kuartal Ke-II, III dan IV Tahun 2017 serta Berita Acara penataan kawasan lindung rawa dan sempadan sungai.</p> <p>Wajib kelola dan laporan yang belum terealisasi adalah kelola KPPN dan KPSL sesuai dengan fungsi perlindungannya dan penyediaan laporan hasil tindak kelola ke-2 kawasan lindung tersebut.</p> |
| 3.2 BAIK (3) | 3.2.1 | Baik (3) | <p>PT SRL telah menyusun beberapa dokumen prosedur kerja perlindungan dan pengaman hutan yang mencakup seluruh potensi gangguan yang ada yaitu: SOP Perlindungan Hutan; SOP Analisa Kebakaran Hutan dan Lahan; SOP Analisa Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan; SOP Persiapan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan; SOP Respon Kebakaran Hutan dan Lahan; SOP Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Pasca); SOP Monitoring HPT Di Area Plantation; SOP Verifikasi Serangan HPT Di Areal Plantation; SOP Pengajuan PK No SRL/SOP/R&D/017 Juli 2017; SOP Pelaporan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman; SOP Operasional Nursery; SOP Operasional Nursery Sengon; SOP Operasional Nursery Eucalyptus sp; SOP Operasional Nursery Jabon.</p> <p>SOP Perlindungan Hutan telah mencakup prosedur kerja perlindungan dari gangguan 1). Penanganan <i>illegal logging</i>; 2). Penanganan perambahan lahan; 3). Penanganan pertambangan tanpa izin; 4). Perburuan satwa liar; 5). Pengembalaan liar dan; 6). Penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik dan bahan peledak</p> |
| | 3.2.2 | Baik (3) | <p>Sarana perlindungan hutan PT SRL sesuai dengan potensi gangguan yang ada antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sarana security (Pos CORA, Pos Security, Unit LV double gardan, radia HT dan RIG dan lain-lain); 2) Saran persemaian (paranet, alat semprot, pestisida, gudang penyimpanan racun dan pupuk). 3) Sarana pemadam kebakaran antara lain berupa : <ol style="list-style-type: none"> a) Sarana penyadartahuan : komputer, televisi, screen, poster, booklet b) Sarana keteknikan : jalur hijau, embung/<i>water point</i> c) Sarana POSKO kritis : rungan dengan meja kursi, laptop, meja komputer, infokus, monitor, sarana komunikasi, kendaraan operasional . d) Sarana peringatan dini : peta rawan kebakaran, peta kerja, database SDM pengendali kebakaran hutan, rambu larangan e) Sarana dini kebakaran hutan : menara, informasi hotspot, GPS, drone f) Perlengkapan pribadi : topi pengaman, lampu kepala, kacamata pengaman, sarung tangan, sepatu pemadam, baju pemadam, kantong tidur . g) Perlengkapan regu : kapak, parang, sekop, garu pacul, gepyok . h) Peralatan mekanis : popma tekana tinggi. Selang, nozle, chain saw i) Kelengkapan pompa j) Peralatan pengolah data dan komunikasi : GPS, radio, megaphone k) Sarana transportasi : kendaraan roda dua, kendaraan roda 4. <p>Sarana pemadam kebakaran hutan PT SRL telah sesuai jenis, jumlah dan kondisinya dengan PERMENLAHK RI NOMOR P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.</p> |
| | 3.2.3 | Baik (3) | <p>PT SRL telah menyusun beberapa struktur organisasi Sehubungan dengan perlindungan dan pengamanan hutan dan lahan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Organization Chart</i> PT SRL Distrik Kembang Janggut, Maret 2018 2. Struktur Petugas Keamanan Distrik PT Silva Rimba Lestari, April 2018. 3. Struktur Organisasi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan PT Silva Rimba Lestari Distrik Kembang Janggut, April 2018. <p>SDM perlindungan hutan PT SRL sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga pengamanan hutan (security) tersedia sebanyak 14 orang dan telah mengikuti pelatihan. |



| Indikator | Verifier | Auditor | |
|--------------------|----------|----------|--|
| | | Nilai | Argumen |
| | | | <p>2. SDM perlindungan tanaman dari serangan hama dan penyakit sebanyak 8 orang, 5 orang di <i>nursery</i> dan 3 orang di bagian R and D.</p> <p>3. Tim pemadam kebakaran PT SRL terdiri dari 5 regu/tim inti, ditambah 3 Regu Pendukung dan 4 regu MPA. Anggota tim ini telah mengikuti pelatihan yang ditunjukkan oleh sertifikat pelatihan.</p> <p>SDM dengan kompetensi GANIS BINHUT tersedia sebanyak 9 orang dengan rincian 7 orang telah resmi sebagai GANIS BINHUT PT SRL sementara 2 orang lainnya dalam proses mutasi</p> |
| | 3.2.4 | Baik (3) | <p>Potensi gangguan yang ada di areal kerja PT SRL berupa perambahan hutan, <i>illegal logging</i>, kebakaran hutan dan lahan, perburuan satwa liar dan serangan hama penyakit hutan. Tanda-tanda gangguan yang ditemukan selama proses audit berupa <i>illegal logging</i>, perambahan hutan dan hama dan penyakit hutan. Implementasi perlindungan yang ditempuh pemegang izin mencakup seluruh potensi gangguan yang ada dengan tindakan preemtif, prefentif dan represif yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebakaran hutan : Sosialisasi kebakaran hutan, pembentukan MPA, penempatan pos jaga dan portal di sejumlah titik, training dan penyegaran DALKARHUTLA, patroli, pemasangan papan-papan larangan, penyampaian laporan pengendalian kebakaran secara berkala kepada DISHUT Provinsi KALTIM, BKSDA, BPHP Wil XI Samarinda dan KPHP Samarinda, pembuatan sekat bakar. - Perambahan hutan : Sosialisasi perlindungan hutan kepada masyarakat desa Long Beleh Haloq dan Pulau Pinang, paroli, pemasangan papan larangan dan pos jaga serta portal, penyelesaian klam lahan. - <i>Illegal logging</i> : sosialisasi perlindungan hutan, pemasangan papan larangan dan pos jaga serta portal, teguran dan penyitaan barang bukti kayu curian/kayu gesek. - Perburuan satwa liar : sosialisasi perlindungan hutan, pemasangan papan larangan dan pos jaga serta portal. - Serangan hama penyakit tanaman : pelatihan karyawan, pemberdayaan SDM <i>R and D</i>, pemberian fungsida pada media bibit, pemberantasan hama penyakit di persemaian . |
| 3.3 BAIK (3) | 3.3.1 | Baik (3) | <p>Dampak terhadap tanah dan air yang diperkirakan (sesuai dengan dokumen RKL) adalah dampak terhadap kesuburan tanah (fisika dan kimia tanah) dan erosi tanah (sedimentasi, debit air sungai dan kualitas air). Jenis prosedur yang disusun pemegang izin terdiri dari : SOP Pemantauan Kepadatan Tanah dan Pendugaan Erosi; Pemantauan Kualitas Air; SOP Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Areal Kerja; SOP Penebangan Kayu Alam; SOP Persiapan Areal Tanam dan Penanaman; SOP Pembukaan Wilayah Hutan; SOP Pembuatan Jalan dan Jembatan; SOP <i>Road Construction Assesment</i> (RCA); SOP <i>Plantation Monitoring Assesment</i>.</p> <p>Jenis-jenis prosedur yang ada tersebut relevan dengan jenis dampak yang diperkirakan dan hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa prosedur-prosedur tersebut di atas telah mencakup seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air</p> |
| | 3.3.2 | Baik (3) | <p>Sarana kelola dan pemantauan dampak yang direncanakan pada dokumen RKL dan RPL terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana kelola untuk kesuburan tanah : alat berat untuk menggemburkan tanah. 2. Sarana untuk pengelolaan erosi tanah : sisa tebangan, herbisida, dolomit, pupuk, saluran drainase, teras jalan/teras sering, drainase melintang, gorong-gorong, tanaman penutup tanah, jebakan sedimen, jembatan, penampung oli bekas/drum dan <i>oli trap</i>. 3. Jenis sarana pemantauan dampak berupa : peta, kamera, meteran, cangkul, linggis, alat-alat laboratorium, petak erosi, Stasiun Pengamat Air Sungai (SPAS), AWLR, pal scale <i>current meter automatic, suspended sampler water testkit</i>, botol sampel, botol inkubasi BOD, alat titrasi dan bahan preaksi serta alat laboratorium lainnya. |



| Indikator | Verifier | Auditor | |
|-----------|----------|----------|---|
| | | Nilai | Argumen |
| | | | <p>Jenis sarana kelola dan pemantauan dampak yang ditemukan berupa : <i>windrowing</i> (sisa tebangan yang digunakan untuk mengurangi dampak erosi dan mulsa bagi tanaman pokok), teras sering, saluran drainase, cross drain/sudetan, saluran drainase melintang, gorong-gorong, gudang limbah B3 pupuk, pemadatan jalan, TPS untuk limbah domestik, drum penampung oli bekas, TPA untuk limbah domestik, alat berat seperti excavator, bulldozer dan lainnya termasuk bibit Cempedak, Durian, Trembesi dan Jabon pengganti <i>cover crop</i> pengganti <i>Calopogonium sp</i> atau <i>Centrisoma sp</i>).</p> <p>Sarana pemantau dampak : <i>Peilschale</i>, plot erosi, <i>current meter automatic</i>. Sarana pemantau laboratoris lainnya tidak tersedia karena untuk pemantauan fisika dan kimia tanah dan air diserahkan kepada laboratorium yang telah terakreditasi.</p> |
| | 3.3.3 | Baik (3) | <p>Sesuai dengan <i>Organization Chart</i> PT SRL Distrik Kembang Janggut, bagian yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak adalah <i>Health, Safety & Enviro Superintendent</i> (Lukas Rahadiyan Setiawan) dibantu oleh bagian <i>Environmet Staff</i> (Siswo Miharjo dan Arimbi Herlena S.). Bagian dari perusahaan lainnya yang berperan adalah <i>Planning Operation Supt</i> <i>Plannig Operation Supt</i> (dalam merencanakan kelola lingkungan terutama pada kegiatan penyiapan lahan, <i>road contrukction</i>), <i>Nursery Superintendent</i> dan <i>Plantation Superintendent</i> dalam hal penyiapan bibit dan pelaksanaan kelola vegetatif.</p> <p>SDM dengan kualifikasi GANIS BINHUT PT SRL sebanyak 9 orang, 7 orang telah resmi tercatat sebagai GANIS PT SRL dan selebihnya masih dalam proses mutasi. Pemenuhannya terhadap PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHHK/2015 mencapai 100 %.</p> |
| | 3.3.4 | Baik (3) | <p>Terdapat dokumen rencana kelola dampak terhadap tanah dan air berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) IUPHHK-HT PT SRL Tahun 2010. Implementasi kelola dampak berupa :</p> <p>1. Kesuburan Tanah (Sifat Fisik dan Kimia Tanah)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak semua bekas TPN ditanami kembali. Pertimbangannya adalah masa <i>blanking</i> cukup lama, sehingga kalau ditanami tanaman yang ditanam umurnya berbeda cukup jauh dari tanaman di kompartemen tersebut. - Penyiapan lahan tidak dengan membakar. - <i>Lang clearing</i> secara mekanis dengan menggunakan alat berat . - Penyiapan lahan tanam dengan mengolah pada jalur tanam saja. - Aplikasi dolomit tidak dilakukan karena dianggap pemberian pupuk telah memenuhi. - Penambahan pupuk dasar dengan kandungan N, P dan K (pupuk TSP dan NPK). - <i>Weeding</i> dilakukan disesuaikan dengan jenis tanaman pokok sesuai dengan regim. <i>Weeding chemical</i> : <i>Acacia mangium</i> rentang waktu umur tanaman 1 tahun. Sengon rentang waktu 1 tahun, <i>Eucalyptus pellita</i> rentang waktu 2 tahun. <i>Weeding manual</i> : rentang umur 1 tahun. Kegiatan <i>weeding /slashing</i> tidak sampai mengolah tanah. <p>2. Erosi Tanah (Sedimentasi, Debit Sungai dan Kualitas Air)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan lahan tapan bakar. - Lahan tanam yang diolah terbatas pada jalur tanam. - Penanam tidak pasti arah timur barat tetapi mempertimbangkan kontur. - Pemanfaat sisa tebangan sebagai <i>windrowing</i> (sebagai penghambat erosi dan mulsa). - Penanaman sejajar kontur. - Pemadatan jalan angkutan dan pemeliharaan - Membuat saluran drainase dan sarana sipil teknis lainnya pengendali dan pencegah erosi seperti : <i>silt trap</i>, <i>cross drain</i>, saluran melintang, <i>mating-mating</i>, jembatan/gorong-gorong - Aplikasi <i>cover crop</i> tidak dilakukan tetapi sebagian kecil di kanan atau kiri jalan di tebing ditanami trembesi - TPN dipilih pada area yang datar. - Penyediaan TPA untuk limbah domestik. |



| Indikator | Verifier | Auditor | |
|--------------------|----------|------------|--|
| | | Nilai | Argumen |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan drum penampung oli bekas dan <i>oil trap</i> dibangun pada area bengkel dan pembangkit listrik. - Bengkel kedap air (disemen beton) dan dilengkapi dengan saluran drainase cecceran oli bekas. - Karyawan GANIS BINHUT tersedia 9 orang; Penyertaan karyawan pada pelatihan lingkungan, hama penyakit dan gulma dan lain-lain. <p>Bekerjasama dengan konsultan profesional PT Taksona Reksa Buana untuk penelitian tanah dan bekerjasama dengan perusahaan penyedia jasa pengumpul dan pengelola limbah B3, PT Balik Papan Environment Services.</p> |
| | 3.3.5 | Sedang (2) | <p>Tersedia dokumen rencana pemantauan dampak berupa Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup PT Silva Rimba Lestari Tahun 2010. Pemantauan dampak direncanakan sebanyak 16 bagian yang meliputi kesuburan tanah (sifat fisika dan kimia tanah), erosi tanah, Debit Sungai, Sedimentasi dan Kualitas Air .</p> <p>Realisasi pemantauan selama periode audit sebanyak 10 kegiatan berupa: Pengamatan visual (langsung) terhadap gejala erosi alur/parit (mencakup luas dan ukuran areal tererosi) di jalan, ilaran api, TPn/TPK; Pengamatan ada/tidak deposisi sedimen; Pemantauan seresah, tingkat penutupan vegetasi, top soil di hamparan bekas terbangun; Pengambilan sedimen dengan <i>suspended sampler</i> untuk pemantaun sedimen</p> <p>Dengan demikian, implementasi pemantauan mencapai 71,43 % dari yang direncanakan.</p> |
| | 3.3.6 | Sedang (2) | <p>Kelola hutan selama periode 1 tahun terakhir tidak berdampak terhadap Kesuburan Tanah, Erosi Tanah dan Debit Air. Hal ini ditunjukkan oleh data hasil analisa laboratorium untuk tanah, data hasil pemantauan erosi dan data hasil analisa debit air sungai yang dinyatakan dalam Koefisien Rejim Sungai (KRS) yang merupakan perbandingan Q_{max}/Q_{min}.</p> <p>Dampak terhadap tanah yang belum diketahui adalah erosi wilayah yang merupakan resultante dari pendugaan erosi dengan metode USLE dari data erosi yang diperoleh dari plot erosi.</p> <p>Gejala dampak ditunjukkan pada kualitas air sungai/air permukaan dimana hasil analisa laboratorium menunjukkan beberapa komponen air seperti TSS, BOD dan COD melebihi ambang batas maksimal sesuai dengan PPRI No 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Hasil pamantauan sesaat pada saat dilakukan observasi lapangan menunjukkan gejala dampak berupa air Sungai Sentekan cukup keruh meskipun tidak sedang turun hujan.</p> <p>Upaya kelola untuk menekan dampak seperti telah disampaikan sebelumnya pada verifier 3.3.4.</p> |
| 3.4 BAIK (3) | 3.4.1 | Baik (3) | <p>Prosedur kerja identifikasi flora dan fauna PT SRL di atur pada SOP Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Prosedur memuat: 1). Arahan identifikasi disesuaikan dengan peraturan nasional, CITES dan IUCN; 2). Identifikasi jenis mencakup seluruh flora dan fauna dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rared</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik; 3). Pengelompokan identitas perlindungan diatur dalam regulasi yang ada dan terupdate secara <i>online</i> di di website (www.iucnredlist.org dan http://cittes.org) IUCN Redlist serta CITES appendix.</p> <p>Prosedur kerja identifikasi yang disusun PT SRL telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada di areal kerja pemegang izin.</p> |
| | 3.4.2 | Baik (3) | <p>PT SRL telah menyelesaikan Laporan Final Penilaian <i>High Conservation Value</i> (HCV) Di areal IUPHHK-HT PT SRL tahun 2017. Dokumen ini melampirkan data flora dan fauna hasil inventore dan telah diidentifikasi staus perlindungan dan katagori kerawanannya sesuai dengan PPRI No 7 Tahun 1999, CITES dan IUCN. Memperhatikan cakupan area inventori flora dan fauna yang dikembangkan, jenis-jenis flora dan fauna yang diinventore dan kemudian diidentifikasi, telah mencakup seluruh jenis yang ada di areal kerja PT SRL.</p> |
| 3.5 SEDANG | 3.5.1 | Sedang (2) | <p>Prosedur kelola flora berupa SOP Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Dokumen ini mengatur mekanisme pengelolaan habitat (kawasan</p> |



| Indikator | Verifier | Auditor | |
|----------------------|----------|------------|---|
| | | Nilai | Argumen |
| (2) | | | <p>lindung) dan perlindungan jenis flora yang dikategorikan dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada di areal pemegang izin. Salah satu mekanisme perlindungannya adalah "Tidak menebang pohon-pohon dilindungi yang berada di areal efektif untuk produksi (<i>compartment</i>), mengacu pada SOP ITSP Hutan Alam".</p> <p>Namun SOP ITSP Hutan Alam hanya mengatur mekanisme inventore dengan Intensitas Sampling (IS) sebesar 5 % dan tentu saja tidak mewakili sebaran jenis-jenis pohon dimaksud. Oleh karena itu, jenis-jenis pohon yang dikategorikan dilindungi, tidak aman dari kegiatan penebangan pada saat dilakukan <i>land clearing</i>.</p> <p>SOP Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan belum dapat mewakili pengelolaan/perlindungan terhadap seluruh jenis flora dilindungi dan rawan yang ada di areal pemegang izin.</p> |
| | 3.5.2 | Sedang (2) | <p>Terdapat bukti-bukti implementasi kelola flora berupa : 1). Penandaan pohon tidak ditebang di kompartemen/areal efektif untuk produksi berupa pohon penghasil buah dan manfaat HHBK lainnya; 2). Pemasangan papan larangan; 3). Pemasangan papan kawasan lindung; 4). Inventarisasi dan ANVEG di sempadan sungai Buaya dan; 5). Sosialisasi kepada masyarakat Desa Pulau Pinang dan Long Beleh Haloq. Hasil kegiatan kelola disampaikan pada beberapa dokumen laporan yaitu : Laporan Final Penilaian <i>High Conservation Value</i> (HCV) Di areal IUPHHK-HT PT Silva Rimba Lestari, Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I dan II 2017 dan Laporan Pengelolaan Kawasan Lindung PT SRL.</p> <p>Tindak kelola yang belum dilakukan adalah : 1). Penandaan pohon tidak ditebang yang tergolong <i>Critical Endangered</i> di kompartemen; 2). Kalola dan penyusunan laporan KPPN; 3). Inventarisir potensi jenis flora dan fauna di KPSL dan penyusunan laporannya.</p> |
| | 3.5.3 | Sedang (2) | <p>Di areal kerja PT SRL masih dijumpai jenis-jenis dilindungi dan langka. Sepuluh jenis tergolong <i>Critically Endangered</i> (CR) terdiri-dari (1) <i>Dipterocarpus cornutus</i> Dyer (Keruing daun besar), (2) <i>Dipterocarpus tempehes</i> Slooten (Keruing daun kecil), (3) <i>Hopea mengarawan</i> Miq (Merawan), (4) <i>Hopea pubescens</i> Ridl (Merawan), (5) <i>Hopea sangal</i> Korth. (Merawan), (6) <i>Shorea balangeran</i> Korth Burck (Belangeran), (7) <i>Shorea johorensis</i> Foxw (Meranti Majau), (8) <i>Shorea lamellata</i> Foxw (Meranti putih), (9) <i>Shorea palembanica</i> Miq. (Meranti), (10) <i>Shorea smithiana</i> (Merambung). Seluruh jenis tersebut termasuk jenis niagawi.</p> <p>Sedangkan jenis dilindungi oleh PPRI Tahun 1999 sebanyak 4 jenis yaitu : 1). <i>Shorea palembanica</i>; 2). <i>Nepenthes gracilis</i>; 3). <i>Nepenthes reinwardtiana</i> dan; 4). <i>Borassodendron borneense</i>.</p> <p>Jenis-jenis terutama jenis yang tergolong niagawi (katagori <i>Critically Endangered</i>) kondisinya tidak aman akibat ancaman penebangan liar yang masih terjadi di sempadan sungai.</p> |
| 3.6 SEDANG (2) | 3.6.1 | Baik (3) | <p>Prosedur kerja kelola fauna yang dilindungi dan/atau, langka, jarang, terancam punah dan endemik PT SRL berupa SOP Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Prosedur kelola mencakup kelola habitat (kawasan lindung) , perlindungan jenis dan identifikasi status perlindungan dan kerawanan sesuai dengan regulasi yang ada, <i>IUCN Redlist</i> dan <i>CITES Appendix</i>. Mekanisme permutakhiran identitas kerawanan jenis diatur dengan mengidentifikasi ulang data yang telah disusun sebelumnya secara online di website (www.iucnredlist.org dan http:\cittes.org) <i>IUCN Redlist</i> serta <i>CITES appendix</i>."</p> |
| | 3.6.2 | Sedang (2) | <p>Dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I dan II tahun 2017, Laporan Pengelolaan Kawasan Lindung PT SRL dan Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung PT SRL tanggal 22 Maret 2018 termuat tindak kelola fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang telah dilakukan pemegang izin berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi kawasan lindung dan ditetapkan/dikukuhkan melalui Surat Keputusan Nomor : 002/SRL-SK-ADM/IV/2018 Perihal : Penetapan Kawasan Lindung PT Silva Rimba Lestari Tanggal 2 April 2018 Oleh Ir. Budi Eko Utomo (Direktur). |



| Indikator | Verifier | Auditor | |
|-----------|----------|------------|---|
| | | Nilai | Argumen |
| | | | 2. Penandaan kawasan lindung, yang terbaru disampaikan pada beberapa dokumen berita acara (seperti disampaikan pada verifier 3.1.2). 3. Sosialisasi kawasan lindung, satwa dilindungi kepada masyarakat Desa Pulau Pinang dan Long Beleh Haloq. 4. Identifikasi NKT 5. Identifikasi ulang status kerawanan jenis fauna. Wajib kelola yang belum terealisasi adalah : 1. Melakukan pemantauan secara berkala keberadaan satwa dilindungi di areal KPSL 2. Melakukan pencatatan/pendataan secara berkala mengenai keberadaan satwa di kawasan lindung sempadan sungai dan KPPN. |
| | 3.6.3 | Sedang (2) | Di areal kerja PT SRL masih ditemukan jenis-jenis fauna yang termasuk dilindungi dan tergolong langka, namun Kondisinya relatif tidak aman sebab konversi hutan alam menjadi hutan tanaman yang cenderung homogen dan perburuan satwa liar. Upaya penanggulangan gangguan seperti dirinci pada verifier 3.2.4. |

D. Kriteria Sosial

| Indikator | Verifier | Auditor | |
|---------------------|----------|---------------|---|
| | | Nilai | Argumen |
| 4.1. BAIK (3) | 4.1.1 | Baik (3) | Terdapat Laporan Penilaian HCV, Hasil Pemetaan Pemanfaatan Lahan Masyarakat Sekitar Areal PT SRL, Laporan Kajian Sosial Komunitas Sekitar Areal PT SRL, yang telah memuat data dan informasi mengenai kondisi masyarakat termasuk pola penguasaan dan pemanfaatan lahan. Adapun dalam hal perencanaan pemanfaatan SDH, dokumen-dokumen yang dimiliki seperti Dokumen RKUPHHK periode 2011-2020, RKT 2017 dan Rencana Program CSR Comvest Department PT SRL 2017. Rencana pengelolaan tanaman kehidupan dilakukan atau disusun bersamaan dengan rencana pengelolaan tanaman pokok. rencana . Pada lingkup pengelolaan hutan tanaman, penataan batas dan luas areal tanaman kehidupan merupakan salah satu implementasi dari penataan batas partisipatif. |
| | 4.1.2 | Baik (3) | Pada pelaksanaan kegiatan penentuan batas dan luas klaim lahan oleh masyarakat serta penanganan konflik, PT SRL berpedoman pada SOP Penanganan Konflik Sosial , SRL-SOP-CA 001; SOP Penanganan Konflik Non Lahan SRL-SOP-CA 010 dan SOP Identifikasi dan Inventarisasi Lahan, SRL-SOP-CA 012. Standar prosedur yang digunakan telah memenuhi legal dokumen dan relevan dengan kondisi areal lingkup perusahaan |
| | 4.1.3 | Baik (3) | Implementasi pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH dilakukan dengan serangkaian program <i>community investment</i> yang mencakup empat pilar kegiatan yakni perekonomian, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya. Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada mekanisme yang telah dibakukan dalam bentuk standar operasi procedure atau SOP yakni SOP Program Ekonomi; SOP Program Kesehatan; SOP Program Pendidikan dan SOP Program Karikatif; SOP Pembayaran Fee Kayu; SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu; dan SOP Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT)/Tali Asih. |
| | 4.1.4 | Sedang (2) | PT SRL telah melakukan penandaan batas areal kerja dengan sebagian lahan klaim masyarakat sehingga batas antara keduanya terlihat jelas dan tegas. Penandaan batas-batas belum mencakup areal konsesi secara keseluruhan, penataan batas yang telah dilakukan bersifat sementara karena batas akan berubah apabila lahan-lahan lain yang diklaim masyarakat dapat diambil alih dan diubah menjadi areal efektif perusahaan |
| | 4.1.5 | Sedang (2) | PT SRL telah melakukan kegiatan penataan batas partisipatif pada salah satu lokasi di dalam areal konsesi, yakni batas antara lahan yang dikuasai |



| Indikator | Verifier | Auditor | |
|---------------------|----------|---------------|---|
| | | Nilai | Argumen |
| | | | <p>kelompok tani Banua Etam dengan areal tanaman kehidupan Long Beleh Haloq. Berita Acara penataan batas partisipatif ditandatangani para pihak yakni unsur pemerintahan Desa Long Beleh Haloq, ketua adat dan pihak PT SRL.</p> <p>Di dalam areal PT SRL terdapat lahan yang masih dikuasai masyarakat dengan jenis penutupan lahan berupa belukar dan kebun masyarakat (ladang, bekas ladang dan kebun kelapa sawit). Di areal konsesi masih terdapat potensi konflik dan sekaligus menunjukkan penataan batas partisipatif belum <i>clear and clean</i></p> |
| 4.2. BAIK (3) | 4.2.1 | Baik (3) | PT SRL telah memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial secara lengkap, terdiri dari dokumen legalitas yang dikeluarkan pemerintah, dokumen kebijakan dan strategi perusahaan, dokumen database sosial masyarakat adat/masyarakat setempat, dokumen prosedur, dokumen perencanaan dan laporan realisasi kegiatan kelola sosial. Dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku |
| | 4.2.2 | Baik (3) | PT SRL telah memiliki SOP Pembayaran Fee Kayu; SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu; SOP Program Ekonomi; SOP Program Kesehatan; SOP Program Pendidikan dan SOP Program Karitatif. Standar operational prosedur yang dimiliki PT SRL telah mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Secara kuantitatif prosentase kepemilikan mekanisme pemenuhan tanggungjawab sosial adalah 100 % |
| | 4.2.3 | Baik (3) | PT SRL telah melakukan sosialisasi terkait hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH melalui kegiatan sosialisasi RKT 2017, program CSR, batas areal kerja dan pengelolaan tanaman kehidupan. Kegiatan sosialisasi telah mencakup kelompok-kelompok masyarakat yang secara langsung merasakan dampak dari kegiatan pengelolaan hutan tanaman yang dilakukan perusahaan yakni masyarakat Desa Pulau Pinang dan Long Beleh Haloq. Wilayah kedua desa tersebut masuk kedalam Blok RKT sesuai dengan sesuai dengan Peta RKU UPHHK-HT PT SRL Periode 2011 – 2020 |
| | 4.2.4 | Baik (3) | PT SRL telah merealisasikan seluruh rencana kegiatan pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat, baik rencana kegiatan kelestarian fungsi sosial yang terdapat pada Dokumen RKT 2017 mau pun rencana program CSR oleh departemen Community Investmen. Secara kuantitatif, realisasi program CSR departemen Comvest terlaksana seluruhnya atau 100 % sedang realisasi anggaran/budget sebanyak 99,03 % |
| | 4.2.5 | Baik (3) | PT SRL memiliki laporan lengkap mengenai realisasi kegiatan yang terkait dengan pemenuhan tanggungjawab sosial sebagai pemegang izin pengelolaan SDH. Dokumen utama adalah Laporan Tahunan Tanggungjawab Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat. Program CSR Comvest Departemet PT SRL Tahun 2017. Dilengkapi dengan Berita-berita Acara serah terima bantuan, Berita acara penyelesaian kegiatan, Berita acara serah terima ganti rugi/tali asih serta dokumentasi kegiatan. |
| 4.3. BAIK (3) | 4.3.1 | Sedang (2) | PT SRL memiliki data dan informasi tentang kondisi terkini mengenai database masyarakat setempat, akan tetapi belum menggambarkan kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan hutan tanaman yang dijalankan PT SRL |
| | 4.3.2 | Baik (3) | Mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat yang dimiliki dan dikembangkan PT SRL adalah MoU dengan masyarakat desa, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan SOP Program ekonomi dan Pelatihan Keterampilan telah mengkomodir seluruh kegiatan program CSR, baik yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan maupun bidang perekonomian masyarakat |
| | 4.3.3 | Baik (3) | Rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat ditemukan pada Dokumen RKT 2017 dan Rencana Program |



| Indikator | Verifier | Auditor | |
|---------------------|----------|-------------|--|
| | | Nilai | Argumen |
| | | | CSR Comvest Departement PT SRL Tahun 2017 yang merupakan penjabaran dari Dokumen RKUPHHK-HT 2011-2020 |
| | 4.3.4 | Baik (3) | Implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan program CSR. Seluruh program dapat direalisasi. Peningkatan peran masyarakat terimplementasi pada kegiatan-kegiatan rekrutmen karyawan dari daerah lokal, pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api, pelatihan pemadaman kebakaran, pelatihan usahatani singkong gajah, pelatihan pembukaan lahan dan penghoan tanah tanpa bakar. Program terkait peningkatan aktivitas ekonomi antara lain kerjasama dengan KSU Anugrah Alam Persada Desa Pulau Pinang dan KSU Tunas Harapan Desa, Desa Long Beleh Haloq; kemitraan pengelolaan tanaman kehidupan, demplot tanaman singkong gajah. Secara kuantitatif implementasi rencana kegiatan pengelolaan sosial yang terkait dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat adat/masyarakat setempat sepanjang tahun 2017 terealisasi seluruhnya. |
| | 4.3.5 | Baik (3) | Bukti-bukti pelaksanaan distribusi manfaat kepada karyawan, masyarakat dan pemerintah dimiliki PT SRL dan terdokumentasi secara lengkap, baik dalam bentuk dokumen atau laporan maupun berupa Berita Acara Serah Terima Bantuan, kuitansi pelunasan kewajiban, dan foto-foto visual kegiatan. Beberapa dokumen terkait antara lain Laporan Realisasi Program CSR PT SRL Tahun 2017, Database Karyawan Bulan April 2018, Surat Bukti Lunas Pembayaran PSDH/DR dan PBB |
| 4.4. BAIK (3) | 4.4.1 | Baik (3) | Pada tahun 2017 konflik yang terjadi di areal konsesi PT SRL adalah konflik berbasis lahan dan non lahan. Satu dari lima konflik berbasis lahan dapat diselesaikan, empat kasus yang lain sedang dalam proses. Adapun kasus non lahan seperti illegal logging, hilangnya kayu barang bukti hasil sitaan dan penyetopan operasional alat berat di areal Blok RKT 2017 tanaman kehidupan Desa Long Beleh Haloq, dapat diselesaikan. Pada proses penyelesaian konflik, PT SRL menggunakan acuan SOP Penyelesaian Konflik Sosial dan SOP Penyelesaian Konflik Non Lahan.. Kedua SOP legal dan relevan dengan lingkup perusahaan |
| | 4.4.2 | Baik (3) | PT SRL memiliki <i>peta</i> potensi konflik yang berbasis lahan dan non lahan. Peta tersebut dilengkapi dengan informasi tenurial dan informasi lain yang terkait dengan potensi konflik yang dipetakan. Deskripsi tentang informasi tenurial terdokumentasi pada beberapa dokumen antara lain Pemetaan Land Claim Masyarakat Desa Pulau Pinang dan Desa Long Beleh Haloq serta ground Survey areal RKT 2017 di wilayah Desa Pulau Pinang dan Desa Long Beleh Haloq. Selain itu, terdapat dokumen lain yang berkaitan dengan potensi konflik dan konflik yang telah terpetakan, yaitu Kronologis penyelesain kasus konflik berbasis lahan dan kasus konflik non lahan |
| | 4.4.3 | Baik (3) | PT SRL telah memiliki tim penanganan konflik. Keanggotaan tim pada struktur organisasi lengkap dan memiliki kompetensi yang baik. Selain itu terdapat koordinasi dengan pihak eksternal seperti pemerintahan kecamatan/desa. Pengalokasi dana untuk membiayai resolusi konflik sangat memadai dan dimasukkan pada dokumen rencana program community investmen perusahaan |
| | 4.4.4 | Baik (3) | Pada tahun 2017 PT SRL berhasil penyelesaian beberapa kasus konflik berbasis lahan maupun non lahan. Kronologis penyelesaian kasus mulai dari awal tuntutan klaimer hingga resolusi konflik yang disepakati, berikut berita acara kesepakatan dan dokumentasi visual proses penyelesaian, terekam dan terdokumentasi dengan baik, lengkap dan jelas. |
| 4.5. BAIK (3) | 4.5.1 | Baik (3) | PT SRL telah merealisasikan hubungan industrial dalam lingkup perusahaan. Seluruh unsur yang dipersyaratkan bagi terjadinya hubungan industrial seperti keberadaan pengusaha, pekerja dan pemerintah telah terpenuhi. Implementasi hubungan industrial berupa peraturan perusahaan (PP) dan surat perjanjian kerja (SPK) telah dimiliki dan sesuai dengan ketentuan perundangan. Terkait dengan keberadaan serikat |



| Indikator | Verifier | Auditor | |
|-----------|----------|---------------|--|
| | | Nilai | Argumen |
| | | | pekerja, direksi PT SRL telah mengeluarkan Surat Edaran tentang kebebasan berserikat dan membentuk organisasi karyawan |
| | 4.5.2 | Sedang (2) | Pada tahun 2017 PT. SRL menyusun rencana pengembangan kompetensi karyawan. Rencana kegiatan training sebanyak 32 kegiatan, akan tetapi yang dapat terselenggara sebanyak 15 kegiatan. Perusahaan juga menyertakan personel pada diklat tertentu yang diselenggarakan oleh pihak luar sebanyak sebanyak 14 jenis kegiatan. Diklat atau training yang diikuti oleh personel perusahaan sepanjang tahun 2017 adalah sebanyak dua puluh sembilan kegiatan. Dengan demikian Secara keseluruhan tingkat realisasi diklat mencapai 63,04 %. |
| | 4.5.3 | Baik (3) | Ketentuan mengenai jenjang karir yang berlaku di lingkup PT SRL terdapat dalam dokumen Peraturan Perusahaan, SOP Promosi dan Demosi Karyawan; SOP Penilaian Kinerja Karyawan, Pada tahun 2017 dilaksanakan beberapa rotasi karyawan dalam bentuk mutasi dan promosi. Mutasi dan promosi karyawan dilakukan atas keputusan direksi |
| | 4.5.4 | Baik (3) | Standar tingkat kesejahteraan karyawan telah diatur dalam Peraturan Perusahaan PT SRL Periode 2016 -2018. Seluruh ketentuan terkait tunjangan kesejahteraan karyawan telah diimplementasikan kepada seluruh karyawan. Fasilitas untuk karyawan di Basecamp Distrik Kembang Janggut disediakan secara lengkap dan sangat memadai. Karyawan PT SRL tercatat sebagai peserta asuransi dan menjadi anggota program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan |

E. VLK Hutan

| Prinsip | Kriteria | Indikator | Verifier | Auditor | |
|---------|----------|-----------|----------|------------------|---|
| | | | | Hasil Verifikasi | Argumen |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 a | Memenuhi | Tersedia dokumen legal terkait perizinan IUPHHK-HT PT SRL yang lengkap dan sah, yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 165/Menhut-II/2011 tanggal 4 April 2011 yang dilengkapi dengan dengan Peta Kerja IUPHHK-HT PT SRL skala 1 : 100.000. Disamping itu, dilengkapi juga dengan dokumen Akta Pendirian dan Perubahan perusahaan, SIUP dan TDP A.n. PT SRL yang masih berlaku. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur Skala 1 : 250.000 (Lampiran SK. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014), areal kerja PT SRL termasuk kawasan dengan fungsi sebagai Areal Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 67.349 Ha, areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 12.796 Ha, areal Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas ± 5.693 Ha dan areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 2.162 Ha |
| | | | 1.1.1 b | Memenuhi | Tersedia bukti pembayaran berupa Surat Setoran pada Bank Indonesia kepada Bendaharawan Umum Negara Sub Rekening "Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan" dengan nomor rekening No. 1020004203870 Bank Indonesia pada 10 Mei 2011 sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri No. 41/IV-PPHH/1996 tertanggal S.438/VI-BIKPHH/2011 tertanggal 9 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan, Departemen Kehutanan. |
| | | | 1.1.1 c | Memenuhi | PT SRL memiliki data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK. Kegiatan tersebut adalah kegiatan eksploitasi pertambangan Batu Bara oleh PT Bumi Alam Raya berdasarkan Surat Keputusan Menteri |



| Prinsip | Kriteria | Indikator | Verifier | Auditor | |
|---------|----------|-----------|----------|------------------|---|
| | | | | Hasil Verifikasi | Argumen |
| | | | | | Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 34/1/IPPKH/PMDH/2017 tanggal 11 April 2017 |
| 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1 a | Memenuhi | Tersedia dokumen Revisi Rencana Kerja UPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2011 – 2020 atas nama PT SRL untuk areal seluas ± 88.000 Ha di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang telah disetujui oleh A.n Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.36/VI-BUHT/2014 tanggal 18 Juli 2014. Dokumen Revisi RKUPHHK-HT tersebut dilengkapi dengan Lampiran Peta skala 1 : 100.000. Disamping itu, tersedia dokumen Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HT) PT SRL Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT SRL Nomor SK.001/DIR/RKT-SRL/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI PT SRL Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Timur Dokumen, Revisi Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKTUPHHK-HTI) periode tahun 2017 disahkan oleh Direktur PT SRL atas nama Eko Budi Utomo dengan nomor SK 002/DIR/RKT-SRL/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 dan Dokumen Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKTUPHHK-HTI) PT SRL Tahun 2018 berdasarkan keputusan Direktur Utama PT SRL Nomor SK.001/DIR/RKT-SRL/I/2018 tanggal 1 Januari 2018. |
| | | | 2.1.1 b | Memenuhi | Pada peta RKT 2018 dan 2017 menggambarkan lokasi yang boleh ditebang dan secara jelas menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) sebagaimana telah digambarkan dalam Peta RKUPHHK-HT. Observasi lapangan menunjukan bahwa terdapat penandaan batas yang jelas pada areal yang tidak boleh ditebang sebagaimana telah digambarkan pada peta-peta tersebut. |
| | | | 2.1.1 c | Memenuhi | Tersedia Peta RKT 2017, Peta Revisi RKT 2017 dan Peta RKT 2018 skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana pengesahan dokumen RKT PT SRL. Terdapat batas yang jelas pada setiap peruntukan areal kerja PT SRL dan terletak pada posisi yang sesuai dengan Peta RKT 2017, Revisi RKT 2017 dan RKT 2018. |
| | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1 a | Memenuhi | Tersedia dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2011 – 2020 PT SRL Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen telah disetujui oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman, A.n Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.36/VI-BUHT/2014 tanggal 18 Juli 2014. Dokumen Revisi RKUPHHK-HT tersebut dilengkapi dengan Lampiran Peta Kerja RKUPHHK-HT skala 1 : 100.000 dan Peta Tematik yang dibuat dengan skala 1 : 100.000. |
| | | | 2.2.1 b | Memenuhi | Volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal kegiatan penyiapan lahan yang diizinkan pada periode tahun 2015 s/d 2018 (per tanggal 16 April 2018) tercatat sebesar 46,72% dari total rencana produksi. Sedangkan realisasi penebangan berdasarkan luas tercapai 50,87% dari total luas rencana penebangan. Areal penebangan berada di lokasi penyiapan lahan (<i>land clearing</i>) yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Data tersebut |



| Prinsip | Kriteria | Indikator | Verifier | Auditor | |
|---------|----------|-----------|----------|------------------|---|
| | | | | Hasil Verifikasi | Argumen |
| | | | | | menunjukkan bahwa volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya sesuai antara dokumen RKTUPPHK-HT dan kenyataan di lapangan. |
| 3 | 3.1 | 3.1.1 | | Memenuhi | Seluruh kayu yang ditebang pada tahun 2017 dan 2018 telah dibuat LHP-nya oleh petugas pembuat LHP yang telah ditetapkan. Pembuat Laporan Produksi Kayu Hasil Pemanenan (P-LHP) yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT SRL. Hasil uji petik fisik kayu di TPK Antara Logpond Tuana Tuha dan di TPn dengan dokumen LHP perbedaannya < dari 10 %. Sementara jenis dan fisik kayu sesuai dengan dokumen e-LHP. Nomor batang pada e-LHP untuk KB tidak dapat ditemukan tunggaknya di lapangan dikarenakan kayu merupakan hasil dari Blok THPB (hasil <i>Land clearing</i>), Pelacakan kayu hanya sampai ke petak (<i>Kompartement</i>) |
| | | 3.1.2 | | Memenuhi | Pengangkutan kayu dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara, atau menuju ke Industri serta dari TPK Antara menuju ke Industri dalam periode bulan April 2017 s/d 27 Maret 2018 seluruhnya telah dilindungi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah berupa SKSHHK. Dokumen SKSHHK yang diterbitkan PT SRL dalam periode bulan April 2017 s/d 27 Maret 2018 dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara terdiri dari 75 set dokumen yang berisi 665 batang dengan volume 3,456.71 m ³ , dari TPK Hutan menuju ke industry terdiri dari 25 set SKSHHK yang berisi 263 batang dengan volume sebesar 1,179.36 m ³ dan dari TPK Antara menuju ke industry sejumlah 8 set dokumen SKSHHK yang berisi 665 batang dengan volume 3,456.71 m ³ . Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB dengan dokumen LHP (penambahan) dan dokumen SKSHHK menunjukkan adanya kesesuaian. |
| | | 3.1.3 | 3.1.3 a | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi lapangan kesesuaian antara tanda-tanda atau label pada bontos kayu di lapangan dengan dokumen LHP dan dokumen angkutan |
| | | | 3.1.3 b | Memenuhi | Terdapat sistem tata usaha kayu yang diterapkan oleh PT SRL mulai dari kegiatan ITSP sampai dengan penandaan identitas kayu serta Tata Usaha Kayu (TUK) melalui SIPUHH Online. Identitas kayu hasil produksi PT SRL dapat ditelusuri melalui tanda yang digunakan pada log kayu, diantaranya nomor dan jenis kayu untuk kayu yang belum di LHP-kan (baru ditebang) dan label/ <i>barcode</i> untuk kayu yang telah di LHP-kan dan telah dibayarkan kewajiban kepada negaranya (PSDH & DR). Identitas tersebut diterapkan secara konsisten. |
| | | 3.1.4 | 3.1.4. | Memenuhi | Tersedia dokumen SKSHHK Kayu Bulat lengkap dan sah untuk pengangkutan kayu periode bulan Mei 2017 s/d 20 April 2018, yaitu tercatat sebanyak 2,875 set dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara, sementara dari TPK Antara menuju ke industry sebanyak 47 set dokumen SKSHHK. Dokumen SKSHHK Kayu Bulat tersebut dibuat oleh petugas yang berwenang yang A.n. yaitu Tendi Suryana (No Register 01519-11/PKB-R/XX/2014) dan Syamsul Falah, A.Md.Hut (No Register 01615-11/PKB-R/XX/2014). |
| | 3.2 | 3.2.1 | 3.2.1 a | Memenuhi | Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR atau Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga yang diterbitkan periode bulan Mei 2017 s/d 20 April 2018 sesuai |



| Prinsip | Kriteria | Indikator | Verifier | Auditor | |
|---------|----------|-----------|----------|------------------|---|
| | | | | Hasil Verifikasi | Argumen |
| | | | | | dengan LHP yang disahkan baik kelompok jenis, volume, maupun tarifnya. |
| | | | 3.2.1 b | Memenuhi | PT SRL telah melakukan pembayaran/pelunasan PNBP PSDH dan DR sesuai dengan SPP atau kode <i>billing</i> atau Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga dan jumlah tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PT SRL pada periode bulan April 2017 s/d 27 Maret 2018. |
| | | | 3.2.1 c | Memenuhi | PT SRL telah membayar lunas seluruh kewajiban PSDH dan DR dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 68. Tahun 2014 tanggal 15 September 2014. Semenjak bulan maret terdapat perubahan tagihan PSDH sebagaimana diatur dalam Permenhut No. P. 64/MenLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017, sedangkan tariff DR tidak mengalami perubahan. |
| | 3.3 | 3.3.1 | 3.3.1. | Memenuhi | Terdapat dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) A.n. PT SRL dengan Nomor PKAPT : 09.02.1.03626 tanggal 8 Mei 2014, PKAPT PT SRL berlaku hingga tanggal 7 Mei 2019. |
| | | 3.3.2 | 3.3.2. | Memenuhi | Pada periode bulan Mei 2017 s/d 20 April 2018 PT SRL melakukan pengiriman kayu menggunakan moda angkutan air sebanyak 47 kali. Dokumen kapal menunjukkan bahwa kapal pengangkut kayu PT SRL merupakan kapal yang berbendera Indonesia. |
| | 3.4 | 3.4.1 | | Memenuhi | PT SRL telah mengaplikasikan penggunaan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang tertera pada dokumen SKSHHK dan <i>barcode</i> yang ditempel pada kayu bulat dengan No. LPPHPL-008/MUTU/FM-020 |
| 4 | 4.1 | 4.1.1 | | Memenuhi | PT SRL telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap dan disahkan oleh Komisi AMDAL Daerah Kalimantan Timur dengan Nomor : KAKT/05/KOMDAL-PROV/X/10 tanggal 8 Oktober 2010, terdiri dari : Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Proses penyusunan dokumen lingkungan ini mengacu telah sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu : UU Nomor 23 tahun 1997 (Pengelolaan Lingkungan Hidup); PP RI No. 51 tahun 1993 (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan); Kepmenhut No. 218/Kpts-II/94 jo No. 30/Kpts-II/1995 (Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen AMDAL HTI); Kepmen LH RI No. KEP-11/MENLH/3/1994 (Jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). |
| | | 4.1.2 | 4.1.2 a | Memenuhi | Terdapat dokumen RKL dan RPL yang disusun berdasarkan dokumen AMDAL dan merupakan bagian dari dokumen AMDAL itu sendiri yang telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Sumatera Selatan Nomor : KAKT/05/KOMDAL-PROV/X/10 tanggal 8 Oktober 2010. |
| | | | 4.1.2 b | Memenuhi | Terdapat implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dilapangan yaitu pengelolaan kawasan lindung (sempadan sungai, KPPN, DPSL, areal tidak efektif untuk produksi, areal efektif produksi pemantauan dampak penting dan pengelolaannya serta fungsi social kepada masyarakat sekitar areal PT SRL . |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1 a | Memenuhi | Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan K3. Terdapat |



| Prinsip | Kriteria | Indikator | Verifier | Auditor | |
|---------|----------|-----------|----------|------------------|--|
| | | | | Hasil Verifikasi | Argumen |
| | | | | | pula bukti implementasi di lapangan sesuai prosedur yang ditetapkan |
| | | | 5.1.1.b | Memenuhi | Tersedia peralatan K3 di lokasi Camp dan lokasi bekerja dan berfungsi dengan baik. Terdapat prosedur penanganan bila ada keluhan kesehatan dan kecelakaan kerja. |
| | | | 5.1.1 c | Memenuhi | Terdapat catatan kecelakaan kerja perperiodik dan mekanisme penanganannya serta ada upaya menekan tingkat kecelakaan. |
| | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1.1 | Memenuhi | PT SRL tidak memiliki serikat pekerja, namun terdapat memo tentang pernyataan kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh <i>Human Resources Head</i> PT SRL (Tan Wawie) bulan Juli 2017 yang menyatakan bahwa direktur memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja dan karyawan |
| | | 5.2.2 | 5.2.2.1 | Memenuhi | Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT SRL yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan RI cq. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan nomor SK Kep.654/PHIJSK-PK/PP/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT SRL |
| | | 5.2.3 | 5.2.3.1 | Memenuhi | Berdasarkan daftar karyawan PT SRL tahun 2017 diketahui bahwa tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Ofu Affan Gifary yang berumur 23 tahun dengan posisi sebagai <i>Silviculture Practices Staff</i> yang lahir tanggal 17-09-1995 |